

The Influence of Economic Growth, Income Distribution Inequality, Unemployment Rate, Education, Health, Per Capita GDP, and Consumption on the Poverty Rate of Districts/Cities in West Sumatra from 2015-2024

Viki Gusriadi¹, Ansofino², Yosi Eka Putri³
Universitas PGRI Sumatera Barat^{1,2,3}
*E-mail: ¹ vikigusriadi76@gmail.com

Abstract

This study aims to determine: (1) the effect of economic growth on poverty in the regencies/cities of West Sumatra Province, (2) the effect of income distribution inequality on poverty in the regencies/cities of West Sumatra Province, (3) the effect of the unemployment rate on poverty in the regencies/cities of West Sumatra Province, (4) the effect of education on poverty in the regencies/cities of West Sumatra Province, (5) the effect of health on poverty in the regencies/cities of West Sumatra Province, (6) the effect of GRDP per capita on poverty in the regencies/cities of West Sumatra Province, (7) the effect of consumption on poverty in the regencies/cities of West Sumatra Province, and (8) the simultaneous effect of economic growth, income distribution inequality, unemployment, education, health, GRDP per capita, and consumption on poverty in the regencies/cities of West Sumatra Province. This research is a quantitative study conducted in West Sumatra Province from 2015–2024. The data used in this study are secondary data covering the years 2015–2024, with a total of 190 samples. The data collection techniques used were documentation and literature study, while the data were analyzed using panel data regression with the Eviews program. The results of the study show that: (1) an increase in all variables used in this study has an impact on poverty levels in the regencies/cities of West Sumatra Province. The greatest impact was found in the Mentawai Islands Regency at 25.941073 units, while the lowest was in Sawahlunto City at 24.410371 units. (2) An increase in economic growth affects poverty, with the highest impact in the Mentawai Islands Regency at 0.52864 units and the lowest in Sawahlunto City at -1.002062 units. (3) An increase in income distribution inequality impacts poverty, with the highest in the Mentawai Islands Regency at 0.707191 units and the lowest in Sawahlunto City at -0.823511 units. (4) An increase in unemployment affects poverty, with the highest impact in the Mentawai Islands Regency at 0.577847 units and the lowest in Sawahlunto City at -0.952855 units. (5) An increase in education influences poverty, with the highest in the Mentawai Islands Regency at 0.644134 units and the lowest in Sawahlunto City at -0.886568 units. (6) A decline in health affects poverty, with the highest impact in the Mentawai Islands Regency at -4.895513 units and the lowest in Sawahlunto City at -6.426215 units. (7) An increase in GRDP per capita influences poverty, with the highest impact in the Mentawai Islands Regency at -0.355639 units and the lowest in Sawahlunto City at -1.175063 units. (8) An increase in consumption affects poverty, with the highest impact in the Mentawai Islands Regency at 0.853609 units and the lowest in Sawahlunto City at -0.677093 units.

Keywords: Economic growth, income distribution inequality, unemployment, education, health, GRDP per capita.



Licensees may copy, distribute, display and perform the work and make derivative works and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits (attribution) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for non-commercial purposes.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang dihadapi semua negara di dunia, khususnya negara berkembang. Kemiskinan adalah permasalahan yang kompleks dan memiliki banyak aspek, dan perlu ditanggapi dengan serius. Dengan kata lain, kemiskinan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengangguran dan, aspek lain yang berkaitan dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan juga salah satu permasalahan yang paling mendesak di Indonesia. Adanya kemiskinan berarti masyarakat suatu daerah tidak mampu menikmati hasil pembangunan suatu negara. Menurut BPS, seseorang masuk kedalam kategori miskin apabila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Pada September 2024 garis kemiskinan nasional perkapita adalah Rp.595.242 per bulan. Jika Pengeluaran seseorang kurang dari angka tersebut maka mereka dianggap tergolong miskin.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat mencatat sebanyak 335,21 ribu atau 5,92 persen penduduk di provinsi tersebut masuk dalam kategori miskin berdasarkan hasil pendataan pada maret 2022 hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah data kemiskinan Provinsi di Pulau Sumatera.

Tabel 1.
Persentase Penduduk Miskin (P0) Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2015-2024

No	Provinsi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
1	Aceh	17,08	16,73	16,89	15,97	15,32	14,99	15,33	14,64	14,45	14,23	15,56
2	Sumatera Utara	10,53	10,35	10,22	9,22	8,83	8,75	9,01	8,42	8,15	7,99	9,15
3	Sumatera Barat	7,31	7,09	6,87	6,65	6,42	6,28	6,63	5,92	5,95	5,97	6,51
4	Riau	8,42	7,98	7,78	7,39	7,08	6,82	7,12	6,78	6,68	6,67	7,27
5	Jambi	8,86	8,41	8,19	7,92	7,6	7,58	8,09	7,62	7,58	7,1	7,9
6	Sumatera Selatan	14,45	13,54	13,19	12,8	12,71	12,66	12,84	11,9	11,78	10,97	12,68
7	Bengkulu	17,88	17,32	16,45	15,43	15,23	15,03	15,22	14,62	14,04	13,56	15,48
8	Lampung	14,35	14,29	13,69	13,14	12,62	12,34	12,62	11,57	11,11	10,69	12,64
9	Bangka Belitung	5,4	5,22	5,2	5,25	4,62	4,53	4,9	4,45	4,52	4,55	4,86
10	Kepulauan Riau	6,24	5,98	6,06	6,2	5,9	5,92	6,12	6,24	5,69	5,37	5,97
11	Indonesia	11,22	10,86	10,64	9,82	9,41	9,78	10,14	9,54	9,36	9,03	9,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia 2024

Dilihat dari tabel di atas ditampilkan Tingkat kemiskinan pada setiap provinsi di pulau Sumatera tahun 2015-2024. Pada tahun 2022 hingga 2024 tingkat kemiskinan di pulau Sumatera menunjukkan tren penurunan. Penurunan ini juga terjadi di sebagian besar provinsi lain pulau Sumatera. Namun, berbeda dengan tren tersebut, Provinsi Sumatera Barat justru mengalami kenaikan tingkat kemiskinan pada periode yang sama, terutama dalam rentang waktu 2022 hingga 2024.

Berikut disajikan data kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Tabel 2.
Rata-rata 10 Tahun Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Pendidikan Dan Kesehatan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat

No	Wilayah	Kemiskinan (%) Y	Pertumbuhan Ekonomi (%) X1	Distribusi Pendapatan X2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) X3	Penidikan (%) X4	Kesehatan (Tahun) X5	PDRB Perkapita	Konsumsi
1	Kepulauan Mentawai	14,495	3,893	0,2894	2,214	7,008	64,671	52,607	6,336
2	Pesisir Selatan	7,711	4,085	0,2586	6,279	8,116	70,784	29,273	9,270
3	Kab.Solok	8,262	4,199	0,2724	5,411	7,609	68,388	35,856	10,172
4	Sijunjung	6,821	4,021	0,283	4,084	7,939	65,606	39,531	10,420
5	Tanah Datar	4,868	4,01	0,275	4,47	8,43	69,853	36,499	10,588
6	Padang Pariaman	7,44	2,363	0,2714	6,812	7,555	68,602	47,737	10,977
7	Agam	6,976	4,273	0,2739	4,986	8,538	72,222	40,505	9,720
8	Lima Puluh Kota	7,081	4,152	0,2471	3,127	7,907	69,683	41,060	9,644
9	Pasaman	7,275	3,518	0,2694	5,404	7,904	67,273	31,141	8,332
10	Solok Selatan	7,067	4,025	0,2715	4,647	8,13	67,505	31,978	10,343
11	Dharmasraya	6,306	4,132	0,2793	4,808	8,341	71,146	44,943	11,337
12	Pasaman Barat	7,247	4,595	0,2722	4,801	8,198	67,798	36,149	9,031
13	Padang	4,536	4,58	0,3319	11,455	11,356	73,586	67,899	14,470
14	Kota Solok	3,321	4,472	0,2888	5,233	11,045	73,414	56,726	12,135
15	Sawahlunto	2,242	4,195	0,3064	6,208	10,11	69,913	58,421	10,026
16	Padang Panjang	5,799	4,455	0,3167	5,51	11,457	72,642	63,874	10,696
17	Bukittinggi	4,804	4,996	0,2976	5,972	11,252	74,354	70,355	13,264
18	Payakumbuh	5,856	4,597	0,3129	5,33	10,689	73,313	50,105	13,329
19	Pariaman	4,671	4,378	0,3041	5,637	10,438	70,157	55,548	12,785

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 2024

Berdasarkan data rata-rata 10 tahun terakhir pada 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat, diketahui bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kemiskinan antar daerah. Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tingkat kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 14,495%, sedangkan Kota Sawahlunto memiliki tingkat kemiskinan terendah yaitu 2,242%. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan kesejahteraan antar wilayah, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, sebagian besar daerah menunjukkan angka pertumbuhan antara 3% hingga 5%. Namun, pertumbuhan tersebut tidak selalu diikuti oleh penurunan angka kemiskinan, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya bersifat inklusif.

Faktor ketimpangan distribusi pendapatan juga menjadi sorotan. Kota Padang memiliki angka Gini ratio tertinggi yaitu 0,3319, mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif besar. Ketimpangan seperti ini dapat menjadi penyebab utama stagnannya penurunan angka kemiskinan di wilayah-wilayah tertentu.

Tingkat pengangguran turut menjadi faktor yang memengaruhi kemiskinan. Kota Padang memiliki tingkat pengangguran tertinggi yaitu 11,455%, sedangkan Kepulauan Mentawai memiliki tingkat pengangguran terendah yaitu 2,214%. Angka ini menunjukkan bahwa masalah pengangguran lebih dominan di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan, dan hal ini dapat berdampak pada tingginya angka kemiskinan kota.

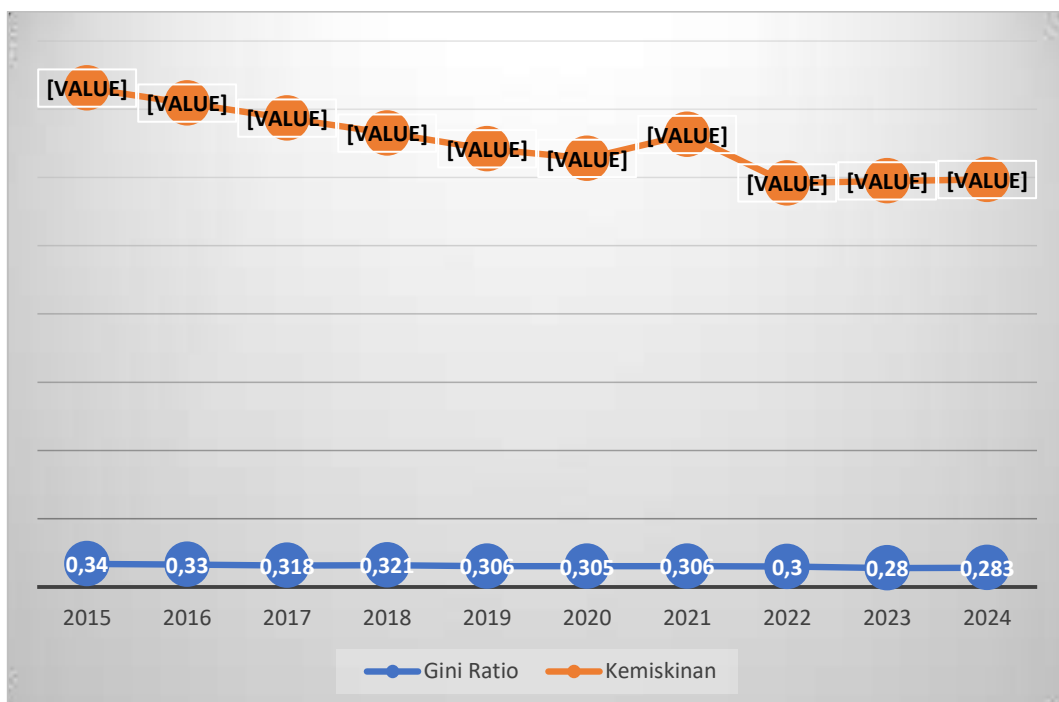
Dalam aspek pendidikan, terdapat kesenjangan antar daerah. Kota Padang Panjang memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi yaitu 11,457 tahun, sedangkan Kepulauan Mentawai hanya 7,008 tahun. Artinya, masih ada daerah yang menghadapi kendala dalam akses dan kualitas pendidikan yang berdampak pada produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Sementara itu, variabel kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup saat lahir menunjukkan kisaran antara 64,671 tahun di Kepulauan Mentawai hingga 74,354 tahun di Bukittinggi. Rendahnya angka harapan hidup mencerminkan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi tingkat kemiskinan.

Dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, terlihat adanya ketimpangan antar daerah. Kota Padang memiliki PDRB per kapita tertinggi sebesar 67,899 juta rupiah, yang menunjukkan kapasitas ekonomi masyarakat lebih besar dibandingkan wilayah lain. Sebaliknya, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki salah satu PDRB per kapita terendah yaitu 29,273 juta rupiah, yang menunjukkan daya dukung ekonomi relatif rendah. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa daerah perkotaan umumnya memiliki struktur ekonomi yang lebih produktif dibandingkan daerah pedesaan atau kepulauan.

Melalui data ini dapat dilihat bahwa kemiskinan di kabupaten/kota di Sumatera Barat tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, pengangguran, pendidikan, Kesehatan, PDRB Perkapita dan konsumsi. Berikut grafik perbandingan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat 2015-2024.

Menurut Maskur et al., (2023) distribusi pendapatan merupakan cerminan atas merata atau timpangnya tingkat penapatan dan hal ini merupakan penentu utama tingkat kemiskinan. Dimana kemiskinan itu sendiri sangat ditentukan atas rata-rata pengeluaran perkapita penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Berikut ini disajikan data ketimpangan distribusi pendapatan *Ginoi Ratio* di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2024

Gambar 1. Perbandingan Ketimpangan Distribusi Pendapatan (Gini Ratio) Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2024.

Dilihat dari yaitu perbandingan ketimpangan distribusi pendapatan (*Gini Ratio*) dan kemiskinan. Pada tahun 2017-2028 *gini ratio* mengalami peningkatan sebesar 0,003 akan tetapi kemiskinan pada tahun yang sama malah mengalami penurunan sebesar 0,22%, kemudian pada tahun 2022-2023 *gini ratio* mengalami penurunan sebesar 0,02 sedangkan kemiskinan pada tahun yang sama mengalami kenaikan sebesar 0,03%. Hal ini jelas bertentangan dengan teori, dimana apabila *gini ratio* di suatu daerah tinggi maka penduduk miskin di daerah tersebut akan meningkat, begitu pula sebaliknya apabila *gini ratio* -nya rendah maka penduduk miskin di daerah tersebut akan menurun. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan, tapi belum memperolehnya. Pengangguran terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dengan penyedia lapangan pekerja. Serta krisis ekonomi menjadi salah satu penyebab berambahnya pengangguran disuatu negara atau daerah.(Winra et al., 2016). Berikut disajikan data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024.

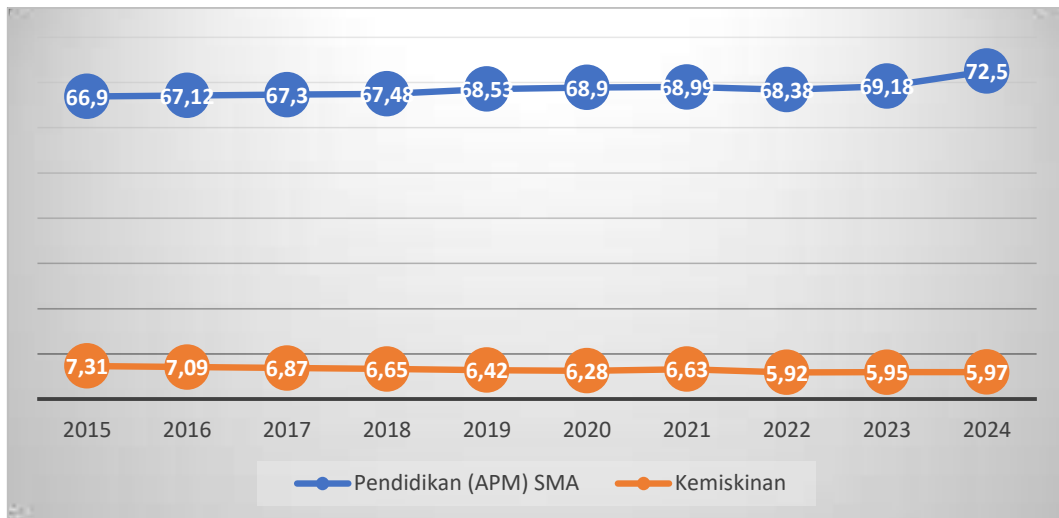


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2024

Gambar 2. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2024

Dilihat dari gambar yaitu perbandingan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami kenaikan sebesar 0,49% akan tetapi kemiskinan malah mengalami penurunan sebesar 0,22%. Pada tahun 2018 Tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan sebesar 0,08% sedangkan kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,22%, tahun 2020 juga demikian. Hal ini menyatan bahwa ini bertentangan dengan teori, dimana apabila jumlah pengangguran suatu daerah meningkat maka tingkat kemiskinan suatu daerah tersebut juga meningkat, begitu pula sebaliknya apabila jumlah pengangguran suatu daerah menurun maka tingkat kemiskinan suatu daerah tersebut juga menurun.

Pendidikan juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, karena pendidikan pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi tingkat keahliannya, sehingga perusahaan tempatnya bekerja memperoleh keuntungan dari hasil yang dikerjakan dan akan memberikan bayaran yang mahal. Dan semakin sejahteralah hidup mereka yang berpendidikan tinggi. Sangat berbeda bagi mereka yang berpendidikan rendah, dengan keahlian yang dimiliki sangat minim sehingga jarang ada pengusaha yang mau untuk menerima bekerja(Tonapa et al., 2022). Berikut disajikan data angka partisipasi murni (APM) SMA Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024.

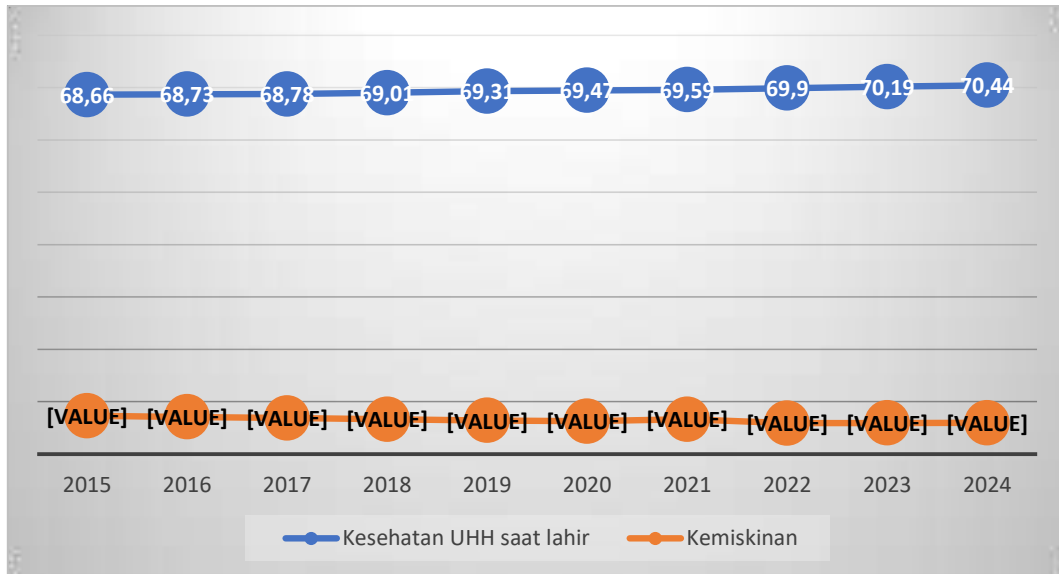


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2024

Gambar 3. Perbandingan Angka Partisipasi Murni) APM) SMA Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2024

Dilihat dari gambar yaitu perbandingan angka partisipasi murni (APM) SMA dan kemiskinan. Dari tahun 2015-2021 angka partisipasi murni (APM) SMA dan kemiskinan berfluktuasi dengan normal. Akan tetapi pada tahun 2022-2024 angka partisipasi murni mengalami kenaikan sebesar 0,02%-0,03% akan tetapi kemiskinan pada tahun yang sama juga mengalami kenaikan sebesar 0,8%-4,32%. Hal ini bertentangan dengan teori, dimana apabila pendidikan suatu daerah meningkat maka tingkat kemiskinan suatu daerah akan menurun, begitu juga sebaliknya apabila tingkat pendidikan suatu daerah menurun maka tingkat kemiskinan suatu daerah itu akan meningkat.

Kesehatan sangat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Kesehatan adalah salah satu pengaruh terbesar dari sebuah kemiskinan. Kesehatan adalah suatu investasi dalam meningkatkan dan juga memperbaiki produktivitas serta kualitas sumber daya manusia sekaligus untuk menjadikan taraf kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Hidup dalam kemiskinan akan mengakibatkan masyarakat hidup dilingkungan yang buruk serta tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan kesehatan, sehingga hal tersebut akan menyebabkan masyarakat miskin rentan terkena penyakit. Tingkat kesehatan diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Berikut disajikan data umur harapan hidup saat lahir di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015-2024.

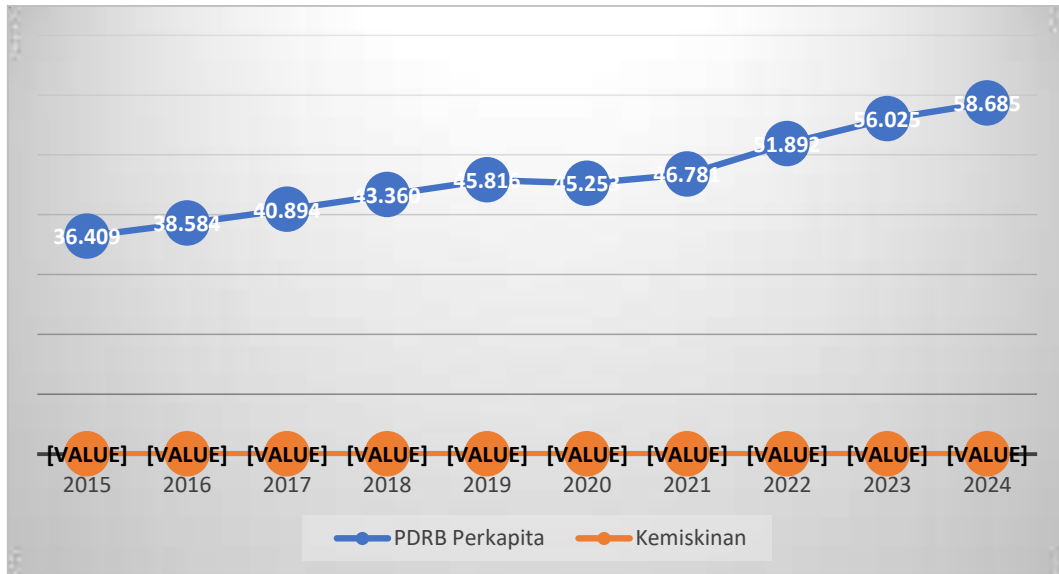


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2024

Gambar 4. Perbandingan Umur Harapan Hidup Saat Lahir Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2024

Dilihat dari gambar diatas yaitu perbandingan umur harapan hidup saat lahir dan kemiskinan pada tahun 2015-2020 berfluktuasi secara normal. Akan tetapi pada tahun 2021 umur harapan hidup saat lahir mengalami kenaikan sebesar 0,12% akan tetapi kemiskinan pada tahun yang sama juga mengalami kenaikan sebesar 0,35%. Kemudian tahun 2023-2024 umur harapan hidup saat lahir mengalami kenaikan akan tetapi kemiskinan pada tahun yang sama juga mengalami kenaikan sebesar. Hal ini justru bertentangan dengan teori, dimana apabila pendidikan suatu daerah meningkat maka tingkat kemiskinan suatu daerah akan menurun, begitu pula sebaliknya apabila pendidikan suatu daerah menurun maka tingkat kemiskinan suatu daerah itu akan meningkat.

Daerah perkotaan seperti Kota Padang memiliki PDRB per kapita yang tinggi karena ditunjang oleh aktivitas ekonomi yang lebih beragam, sektor jasa yang berkembang, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai. Sementara itu, daerah pedesaan maupun kepulauan, seperti Kepulauan Mentawai, masih memiliki PDRB per kapita yang rendah akibat keterbatasan akses transportasi, rendahnya produktivitas sektor ekonomi, serta keterbatasan sumber daya. Dengan demikian, PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur kondisi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut disajikan data rata-rata PDRB per kapita di Provinsi Sumatera Barat tahun 2015–2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat 2024

Gambar 5. Perbandingan PDRB Perkapita Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2024

Berdasarkan gambar diatas terlihat perbandingan antara PDRB Perkapita dan Kemiskinan dari tahun 2015 hingga 2024. Secara umum, PDRB Perkapita mengalami kenaikan yang stabil setiap tahunnya, dari 36.409 pada 2015 menjadi 58.685 pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, angka kemiskinan menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada periode 2015-2022, angka kemiskinan cenderung menurun dari 7.31% menjadi 5.92%, sejalan dengan kenaikan PDRB Perkapita. Namun, pada tahun 2023 dan 2024, terjadi fenomena yang kontradiktif di mana PDRB Perkapita tetap naik, tetapi angka kemiskinan justru mengalami kenaikan tipis dari 5.92% menjadi 5.97%. Kondisi ini menunjukkan adanya pertentangan dengan teori umum, di mana pertumbuhan ekonomi (yang tercermin dari PDRB Perkapita) tidak selalu diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan, yang bisa jadi disebabkan oleh faktor-faktor seperti ketimpangan pendapatan atau inflasi.

Berdasarkan observasi awal Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat, 2) Pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat, 3) Pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat, 4) Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat, 5) Pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat, 6) Pengaruh PDRB perkapita Terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat, 7) Pengaruh konsumsi Terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat, 8) Pengaruh pertumbuhan Ekonomi, ketimpangan Distribusi pendapatan, tingkat pengangguran, Pendidikan, kesehatan, PDRB Perkapita dan konsumsi secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Sumatera Barat, penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2025. Berdasarkan cara memperolehnya maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Berdasarkan waktu pengumpulan data, data penelitian ini adalah time series karena data yang dikumpulkan dari tahun 2015-2024 yang menggambarkan keadaan atau kondisi pada setiap

tahunnya. Berdasarkan sifat data, penelitian ini menggunakan data kuantitatif, karena data yang diperoleh dalam bentuk angka. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka, studi dokumentasi.

1. Asumsi Klasik

Tabel 3.
Hasil Uji Multikolinieritas

	LOGY	LOGX1	LOGX2	LOGX3	LOGX4	LOGX5	LOGX6	LOGX7
LOGY	1	-0,03520	-0,14187	-0,45788	-0,63097	-0,58333	-0,48283	-0,61934
LOGX1	-0,03520	1	0,40429	0,09762	0,08961	0,08758	-0,10840	0,05033
LOGX2	-0,14187	0,40429	1	0,25180	0,07595	0,11049	0,10008	0,16460
LOGX3	-0,45788	0,09762	0,25180	1	0,51445	0,48580	0,14841	0,55381
LOGX4	-0,63097	0,08961	0,07595	0,51445	1	0,69751	0,38931	0,67820
LOGX5	-0,58333	0,08758	0,11049	0,48580	0,69751	1	0,55639	0,77280
LOGX6	-0,48283	-0,10840	0,10008	0,14841	0,38931	0,55639	1	0,54036
LOGX7	-0,61934	0,05033	0,16460	0,55381	0,67820	0,77280	0,54036	1

Sumber: Hasil pengolahan menggunakan Eviews 13

Berdasarkan hasil analisis korelasi pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hubungan antar variabel bebas (X1–X7) memiliki nilai koefisien korelasi yang relatif rendah dan semuanya berada di bawah ambang batas 0,85. Hal ini dapat dilihat dari korelasi antara X1 dengan X2 sebesar 0,40429, X1 dengan X3 sebesar 0,09762, X1 dengan X4 sebesar 0,08961, X1 dengan X5 sebesar 0,08758, X1 dengan X6 sebesar -0,10840, serta X1 dengan X7 sebesar 0,05033. Selanjutnya, koefisien korelasi X2 dengan X3 sebesar 0,25180, X2 dengan X4 sebesar 0,07595, X2 dengan X5 sebesar 0,11049, X2 dengan X6 sebesar 0,10008, dan X2 dengan X7 sebesar 0,16460. Kemudian, korelasi X3 dengan X4 sebesar 0,51445, X3 dengan X5 sebesar 0,48580, X3 dengan X6 sebesar 0,14841, dan X3 dengan X7 sebesar 0,55381. Berikutnya, korelasi X4 dengan X5 sebesar 0,69751, X4 dengan X6 sebesar 0,38931, serta X4 dengan X7 sebesar 0,67820. Sementara itu, koefisien korelasi X5 dengan X6 sebesar 0,55639 dan X5 dengan X7 sebesar 0,77280. Terakhir, korelasi X6 dengan X7 sebesar 0,54036. Seluruh nilai koefisien korelasi tersebut lebih kecil dari 0,85 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas yang berarti dalam model ini. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dinyatakan lolos uji multikolinieritas.

2. Analisis Data

a. Pemilihan Regresi Data Panel

1) Uji Chow

Tabel 4.
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	260.386535	(18,145)	0.0000
Cross-section Chi-square	599.572722	18	0.0000

Sumber: Hasil pengolahan menggunakan Eviews 13

Berdasarkan tabel 9 diketahui nilai *Statistic Cross-section Chi-square* sebesar 627.485860 dengan nilai *Probability* 0.0000. Hal tersebut berarti kurang dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$) maka secara statistik H_a diterima dan H_0 ditolak, sehingga dalam uji *chow* ini, model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

2) Uji Hausman

Tabel 5.
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.425572	7	0.1211

Sumber: hasil pengolahan menggunakan Eviews 13

Berdasarkan tabel 10 diketahui nilai distribusi statistik *Chi Square* sebesar 11.425572 dengan nilai *Probability* 0.1211. Hal ini berarti lebih besar dari 0,05 ($0,1211 > 0,05$) maka secara statistik H_1 ditolak dan H_0 diterima, sehingga dalam uji *hausman* ini, model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM).

b. Model Estimasi Data panel

Tabel 6.
Hasil Uji *Random Effect Model* (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.34670	3.161343	8.017702	0.0000
LOGX1?	-0.065733	0.025248	-2.603479	0.0101
LOGX2?	0.112818	0.054341	2.076114	0.0395
LOGX3?	-0.016526	0.020518	-0.805436	0.4217
LOGX4?	0.049761	0.063059	0.789120	0.4312
LOGX5?	-5.489886	0.853783	-6.430073	0.0000
LOGX6?	-0.238734	0.074635	-3.198699	0.0017
LOGX7?	0.259236	0.192469	1.346893	0.1799
Random Effects (Cross)				
AGAM--C	0.306516			
BUKITTINGGI--C	0.132091			
KABDHARMASRAYA--C	0.113641			
KABLIMAPULUHKOTA--C	0.134090			
KABPASAMANBARAT--C	-0.017451			
KABSOLOK--C	0.148213			
KABSOLOKSELATAN--C	-0.130585			
MENTAWAI--C	0.594373			
PADANG--C	-0.003762			
PADANGPANJANG--C	0.236552			
PADANGPARIAMAN--C	0.104916			
PARIAMAN--C	-0.252874			
PASAMAN--C	-0.043710			
PAYAKUMBUH--C	0.198924			
PESISIRSELATAN--C	0.235659			
SAWAHLUNTO--C	-0.936329			
SIJUNJUNG--C	-0.225336			
SOLOK--C	-0.308571			
TANAHDATAR--C	-0.286355			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.292729	0.9706

Idiosyncratic random		0.050957	0.0294
Weighted Statistics			
R-squared	0.691681	Mean dependent var	0.104210
Adjusted R-squared	0.678440	S.D. dependent var	0.091073
S.E. of regression	0.051644	Sum squared resid	0.434738
F-statistic	52.23901	Durbin-Watson stat	0.927834
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.321238	Mean dependent var	1.798967
Sum squared resid	17.29920	Durbin-Watson stat	0.023317

Sumber: Hasil pengolahan menggunakan Eviews 13

c. Uji Persamaan Regresi Data Panel

Berdasarkan uji chow, dan uji *hausman* model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM). Sehingga selanjutnya dilakukan uji persamaan dari model yang telah terpilih.

$$Y = 25.34670 - 0.065733 X_1 + 0.112818 X_2 - 0.016526 X_3 + 0.049761 X_4 - 5.489886 X_5 - 0.238734 X_6 + 0.259236 X_7$$

Adapun penjelasan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -0.065733 artinya tanpa adanya variabel pertumbuhan ekonomi (X1), ketimpangan distribusi pendapatan (X2), Tingkat pengangguran (X3), pendidikan (X4), kesehatan (X5), PDRB Perkapita (X6) dan konsumsi (X7) maka variabel kemiskinan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar -0.065733.
2. Koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi (X1) sebesar 0.112818 dan bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa arah pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan negatif atau berlawanan. Artinya, apabila pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0.112818 dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Koefisien regresi variabel ketimpangan distribusi pendapatan (X2) sebesar -0.016526 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa arah pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan adalah positif atau searah. Artinya, apabila ketimpangan distribusi pendapatan meningkat sebesar 1 satuan, maka kemiskinan akan meningkat sebesar -0.016526 dengan asumsi variabel lain konstan.
4. Koefisien regresi variabel tingkat pengangguran (X3) sebesar -0,016526 dan bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa arah pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan negatif atau berlawanan. Artinya, apabila tingkat pengangguran meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0,016526 dengan asumsi variabel lain konstan.
5. Koefisien regresi variabel pendidikan (X4) sebesar 0,049761 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa arah pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan positif atau searah. Artinya, apabila pendidikan meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,049761 dengan asumsi variabel lain konstan.
6. Koefisien regresi variabel kesehatan (X5) sebesar -5,489886 dan bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa arah pengaruh kesehatan terhadap kemiskinan negatif atau berlawanan. Dengan kata lain, apabila kesehatan meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 5,489886 dengan asumsi variabel lain konstan.
7. Koefisien regresi variabel PDRB Perkapita (X6) sebesar -0,238734 dan bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa arah pengaruh PDRB Perkapita terhadap kemiskinan negatif atau berlawanan. Artinya, apabila PDRB Perkapita meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 0,238734 dengan asumsi variabel lain konstan.

8. Koefisien regresi variabel konsumsi (X7) sebesar 0,259236 dan bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa arah pengaruh konsumsi terhadap kemiskinan positif atau searah. Dengan kata lain, apabila konsumsi meningkat sebesar 1 satuan, maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,259236 dengan asumsi variabel lain konstan.

3. Uji Hipotesis

a. Uji t

Tabel 7.
Hasil Uji t-Statistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.34670	3.161343	8.017702	0.0000
LOGX1?	-0.065733	0.025248	-2.603479	0.0101
LOGX2?	0.112818	0.054341	2.076114	0.0395
LOGX3?	-0.016526	0.020518	-0.805436	0.4217
LOGX4?	0.049761	0.063059	0.789120	0.4312
LOGX5?	-5.489886	0.853783	-6.430073	0.0000
LOGX6?	-0.238734	0.074635	-3.198699	0.0017
LOGX7?	0.259236	0.192469	1.346893	0.1799

Sumber: hasil pengolahan menggunakan Eviews 13

Penjelasan hasil uji t sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji t, variabel pertumbuhan ekonomi (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0.0101 < 0,05$, sehingga secara parsial berpengaruh (signifikan) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat.
2. Berdasarkan hasil uji t, variabel ketimpangan distribusi pendapatan (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0.0395 < 0,05$, sehingga secara parsial berpengaruh (signifikan) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat.
3. Berdasarkan hasil uji t, variabel tingkat pengangguran (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar $0.4217 > 0,05$, sehingga secara parsial tidak berpengaruh (tidak signifikan) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat.
4. Berdasarkan hasil uji t, variabel pendidikan (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar $0.4312 > 0,05$, sehingga secara parsial tidak berpengaruh (tidak signifikan) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat.
5. Berdasarkan hasil uji t, variabel kesehatan (X5) memiliki nilai signifikansi sebesar $0.0000 < 0,05$, sehingga secara parsial berpengaruh (signifikan) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat.
6. Berdasarkan hasil uji t, variabel PDRB Perkapita (X6) memiliki nilai signifikansi sebesar $0.0017 < 0,05$, sehingga secara parsial berpengaruh (signifikan) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat.
7. Berdasarkan hasil uji t, variabel konsumsi (X7) memiliki nilai signifikansi sebesar $0.1799 > 0,05$, sehingga secara parsial tidak berpengaruh (tidak signifikan) terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

b. Uji F

Tabel 8.
Hasil Uji F

F-statistic	52.23901
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil pengolahan menggunakan Eviews 13

Berdasarkan hasil uji f pada tabel 14, nilai Prob (f statistic) sebesar $0,000000 < 0,05$, sehingga diketahui bahwa variabel bebas diantaranya pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, tingkat pengangguran, Pendidikan, kesehatan, PDRB Perkapita dan konsumsi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

c. Uji R-Suer

Tabel 9.
Hasil Uji R-squer

R-squared	0.691681
Adjusted R-squared	0.678440

Sumber: Hasil pengolahan menggunakan Eviews 13

Berdasarkan hasil analisis regresi, diperoleh nilai koefisien determinasi (R-squer) sebesar 0.691681. Hal ini menunjukkan bahwa 69,1% variasi dalam tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Sumatera Barat dapat di jelaskan oleh variabel-variabel independen, yaitu pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, tingkat pengangguran, Pendidikan, Kesehatan, PDRB perkapita dan konsumsi. Sementara sisanya sebesar 30,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian yang telah diperoleh dapat dilihat sebagai berikut:

1) Berdasarkan penelitian diperoleh hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi (X1) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.0101 < 0,05$, dengan arah positif. Hal ini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

2) Berdasarkan penelitian diperoleh hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan variabel ketimpangan distribusi pendapatan (X2) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.0395 < 0,05$, dengan arah positif. Hal ini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian, ketimpangan distribusi pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

3) Berdasarkan penelitian diperoleh hasil pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan variabel tingkat pengangguran (X3) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.4217 > 0,05$, dengan arah positif. Hal ini berarti H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan demikian, tingkat pengangguran berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

4) Berdasarkan penelitian diperoleh hasil pengujian hipotesis keempat dengan menggunakan variabel pendidikan (X4) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.4312 > 0,05$, dengan arah positif. Hal ini berarti H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan demikian, pendidikan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

5) Berdasarkan penelitian diperoleh hasil pengujian hipotesis kelima dengan menggunakan variabel kesehatan (X5) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.0000 < 0,05$, dengan arah negatif. Hal ini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian, kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

6) Berdasarkan penelitian diperoleh hasil pengujian hipotesis keenam dengan menggunakan variabel PDRB per kapita (X6) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.0017 < 0,05$, dengan arah negatif. Hal ini berarti H_a diterima dan H_0 ditolak. Dengan demikian, PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

7) Berdasarkan penelitian diperoleh hasil pengujian hipotesis ketujuh dengan menggunakan variabel konsumsi (X7) diperoleh nilai signifikansi sebesar $0.1799 > 0,05$, dengan arah positif. Hal ini berarti H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan demikian, konsumsi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

8) Berdasarkan penelitian diperoleh hasil pengujian hipotesis simultan dengan menggunakan uji F, diperoleh nilai Prob (F-statistic) sebesar $0.000000 < 0,05$, sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel pertumbuhan ekonomi, ketimpangan distribusi pendapatan, tingkat pengangguran, pendidikan, kesehatan, PDRB per kapita, dan konsumsi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hasil analisis regresi juga menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0.691681, yang berarti 69,1% variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen tersebut, sementara sisanya sebesar 30,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Apabila terjadi perubahan peningkatan nilai semua variabel yang digunakan dalam penelitian, maka akan berdampak pada kemiskinan wilayah di Kabupaten/kota Sumatera Barat. Maka wilayah penerimaan dampak pada kemiskinan paling besar adalah kabupaten kepulauan mentawai sebesar 25.941073 satuan. Karena rendahnya pendidikan, ketenaga kerjaan yang terbatas dan pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi lapangan pekerjaan yang cukup. Dampak yang paling rendah kemiskinan terdapat di koata sawahlunto sebesar 24.410371 satuan karena adanya program pengentasan kemiskinan yang kuat dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dukungan program kerakyatan yang memperkuat perekonomian masyarat; 2) Apabila terjadi perubahan peningkatan Pertumbuhan ekonomi maka akan berdampak pada kemiskinan wilayah di Kabupaten/kota Sumatera Barat. Wilayah penerimaan dampak pada pertumbuhan ekonomi paling besar terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,52864 satuan, karena kepulauan mentawai merupakan pusat sarana perokonomian terutama dilihat dari sektor parawisata, selain itu mentawai juga memiliki lokasi yang strategis, pemanfaatan sumber daya alam dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Dampak pertumbuhan ekonomi paling rendah terdapat di kota Sawah Lunto sebesar 1,002062, karena masih ketergantungan pada sektor pertambangan dan infrastruktur yang kurang memadai; 3) Apabila terjadi perubahan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan maka akan berdampak pada kemiskinan wilayah di Kabupaten/kota Sumatera Barat. Wilayah penerimaan dampak pada pendidikan paling besar terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0.707191 satuan, karena adanya ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya alam, lahan, modal, dan teknologi. Dampak ketimpangan distribusi pendapatan yang paling rendah terdapat di Kota Sawah Lunto sebesar -0.823511 satuan, karena kualitas sumber daya manusia yang relatif merata diberbagai sektor, sehingga tidak terjadi kesenjangan pendapatan yang terlalu besar; 4) Apabila terjadi perubahan peningkatan Pengangguran maka akan berdampak pada kemiskinan wilayah di Kabupaten/kota Sumatera Barat. Wilayah penerimaan dampak pada pengangguran paling besar terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0.577847 satuan, karena meskipun di mentawai jumlah lapangan pekerjaan banyak, tapi tingkat pendidikan yang rendah munyebabkan tidak dapat mengisi lapangan pekerja, disebabkan keterampilannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Dampak pada pengangguran paling rendah terdapat di Kota Sawah Lunto sebesar 0.952855 satuan Karena lapangan pekerjaannya luas terutama dari sektor pertambangan batu bara yang menawarkan gaji yang lebih tinggi. sehingga dapat meningkatkan pendapatan penduduknya; 5) Apabila terjadi perubahan peningkatan pendidikan maka akan berdampak pada kemiskinan wilayah di Kabupaten/kota Sumatera Barat. Wilayah penerimaan dampak pada pendidikan paling besar terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0.644134 satuan, karena akses pendidikan yang sulit kualitas infrastruktur pendidikan yang rendah, krisis dan rendahnya kualitas tenaga pendidik, rendahnya kesadaran dan partisipasi tentang pendidikan. Dampak pendidikan yang paling rendah terdapat di Kota Sawah Lunto sebesar -0.886568, karena akses pendidikan yang mudah dijangkau, kualitas dan akses pendidikanya lebih baik; 6) Apabila terjadi perubahan peningkatan kesehatan maka akan berdampak pada kemiskinan wilayah di Kabupaten/kota Sumatera Barat.

Wilayah penerimaan dampak pada pendidikan paling besar terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar -4.895513 satuan, karena perubahan pola hidup dan kebiasaan masyarakat, termasuk pengaruh upaya pemerintah daerah dalam penanganan kesehatan. Dampak kesehatan yang paling rendah terdapat di Kota Sawah Lunto sebesar -6.426215, karena akses ke fasilitas kesehatan kurang memadai serta ekonomi dan sosial yang mempengaruhi kesehatan masyarakat; 7) Apabila terjadi perubahan peningkatan PDRB perkapita maka akan berdampak pada kemiskinan wilayah di Kabupaten/kota Sumatera Barat. Wilayah penerimaan dampak pada pendapatan perkapita paling besar terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar -0.355639 satuan, karena dilihat pendapatan sektor pariwisata misalnya infrastruktur, hotel, resort, transportasi dan komunikasi dapat meningkatkan pendapatan. Dampak pendapatan perkapita paling rendah terdapat di Kota Sawah Lunto sebesar -1.175063, karena kurangnya investasi di sektor pertambangan dan infrastruktur yang kurang memadai dapat menghambat pendapatan; 8) Apabila terjadi Perubahan peningkatan konsumsi maka akan berdampak pada kemiskinan wilayah di Kabupaten/kota Sumatera Barat. Wilayah penerimaan dampak pada konsumsi paling besar terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0.853609 satuan, karena sumber pendapatan dari sektor pariwisata, perikanan dan pertanian, serta ketergantungan pangan lokal dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Dampak yang paling rendah terdapat di Kota Sawah Lunto sebesar -0.677093 satuan, karena ketergantungan dari sektor pertambangan yang dapat membatasi pendapatan dan daya beli masyarakat.

Daftar Rujukan

- Arsyad, L. 2021. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Arsyad, R. (2021). Analisis Dampak Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. *Nobel Management Review*, 2(2), 249–258. <https://doi.org/10.37476/nmar.v2i2.1905>
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. *Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2022*. Padang: BPS Provinsi Sumatera Barat.
- Baihaqi, A., & Puspitasari, D. 2020. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 45-54.
- Butar Butar, M. R., Ritonga, M., & Efendi, S. (2023). Pengaruh pengeluaran perkapita, IPM, dan pengangguran terhadap kemiskinan di pulau Sumatera tahun 2016–2021. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi (MAS)*, 24(2), 79–91. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/17587>
- Dieda Genesia Azzahra, D., Riqul Aini, W., & Desmawan, D. (2022). Analisis Dampak Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Menurut Kabupaten Dan Kota Selama Pandemi Covid-19 Di Provinsi Banten. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 01–09. <https://doi.org/10.58192/profit.v1i4.174>
- Dieda Genesia Azzahra, et al. 2022. Hubungan Antara Pengangguran, Kemiskinan dan Kesehatan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 15(1), 22-33.
- Distribusi, T. K. (2022). *Jdess* 01.04.2022. 1(4), 617–629.
- Fadli, M. 2017. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Perspektif Kuznets. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 8(2), 115-123.
- Fitriany. (2021). Analisis pengaruh zakat, PDRB per kapita, dan belanja daerah terhadap kemiskinan di Kota Dumai. *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling dan Dakwah Islam*, 18(2), 121–136. <https://www.ejournal.iaitfdumai.ac.id/index.php/his/article/view/75>
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indrawati, I., et al. 2019. Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(1), 50-59.
- Indrawati, I., Sarfiah, S. N., & Destiningsih, R. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat

- Kemiskinan Provinsi Papua tahun 2014-2019. *DINAMIC (Directory Journal of Economic)*, 2, 1068–1080.
- Irianto. 2010. *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana.
- Nabibah, E. T., & Hanifa, N. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur. *Independent: Journal of Economics*, 2(3), 1–13. <https://doi.org/10.26740/independent.v2n3.p1-13>
- Nabibah, I., & Hanifa, F. 2022. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan: Analisis Regional. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 9(1), 34-47.
- Nadya, A., & Syafri, M. 2019. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Regional*, 6(2), 56–65.
- Ningsih, F., & Andiny, H. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 19(1), 12-20.
- Nugraha Rahmansyah, & Armonitha Lusinia, S. (2022). Analisa Sistem Pendukung Keputusan Kemiskinan Menurut Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 2(1), 76–82. <https://doi.org/10.31849/jurkim.v2i1.9195>
- Nugraha Rahmansyah, & Armonitha Lusinia. 2022. Kemiskinan di Indonesia: Definisi dan Strategi Penanggulangan. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 10(2), 45-53.
- Oktaviani, N., Rengganis, S. P., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021. *EBISMEN : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 1(3), 248–253.
- Permana, Y. 2012. Peran Kesehatan Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Pembangunan Nasional*, 14(1), 89-96.
- Prasetya, Z. T. (2023). Peningkatan PDRB per kapita dan dampaknya terhadap kesejahteraan penduduk. *Jurnal Ilmu Ekonomi*.
- Pribakti, A. 2018. Kemiskinan dan Akses Kesehatan. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(3), 72-78.
- Rahmayani, L., & Andriyani, D. 2022. Analisis Pengangguran dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 13(2), 99-106.
- Retno, D. 2011. Peran Pendidikan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17(4), 23-32.
- Soleh, A. (2018). Analisis dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Jambi. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 79. <https://doi.org/10.33087/eksis.v9i1.135>
- Soleh, M. 2018. Pendekatan Hak Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Sosial dan Kesejahteraan*, 6(2), 39-46.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS dan Eviews*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Suliyanto. 2015. *Metode Riset Bisnis: Untuk Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Suryawati, E. 2005. Dampak Kemiskinan Terhadap Kesehatan. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(2), 30-40.
- Tiara, N. 2010. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 8(2), 77-86.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2003. *Pembangunan Ekonomi* (Edisi ke-8). Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. 2015. *Economic Development* (12th ed.). Pearson Education Limited.
- Tonapa, S. I., et al. (2022). Pengaruh Pendidikan dan Pendapatan Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 66-74.
- Ulya, N. F., & dkk. (2024). Pengaruh pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Kudus (2006–2023) [Universitas Walisongo]. <https://eprints.walisongo.ac.id/>
- Widyasworo, A. 2014. Pendidikan dan Pembangunan: Perspektif Todaro. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 114–122.